



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelataran Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Medan

Alvita Sahriani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : alvitasahriani05@gmail.com

Abstract

The city of Medan is one of the cities in Indonesia that has a fairly high number of two-wheeled and four-wheeled vehicles. The aim of this research is to find out how the policy for managing parking lots on the side of public roads in Medan City is implemented. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. Based on the research results, it shows that the policy for managing parking lots on the side of public roads in Medan City has been implemented, but has not been fully optimized and implemented perfectly. It is known that resources do not fully support the implementation of parking lot management along public roads, this can be seen by the presence of parking attendants who do not comply with existing rules, as well as inadequate financial resources because not all parking locations have parking signs and road markings. Communication between related organizations and socialization regarding policies for managing parking lots on the side of public roads have not gone well because there are still people who do not understand the rules. The characteristics of the implementing organization have not been optimal, where there are still parking attendants who do not use complete attributes when on duty and increasing transparency regarding parking is not evenly distributed. Roadside parking procedures are not yet optimal, it can be seen that there are still parking attendants who do not comply with procedures and parking management is not running optimally.

Keywords: Implementation, Public Policy, Parking Management

Abstrak

Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan sudah terimplementasi, namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna. Hal ini diketahui sumber daya belum mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan pelataran parkir ditepi jalan umum, hal ini terlihat masih adanya juru parkir yang tidak menaati aturan-aturan yang ada, serta belum memadainya sumber daya finansial dikarenakan belum semua lokasi parkir memiliki rambu parkir dan marka jalan.

Komunikasi antar organisasi terkait, sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum belum berjalan baik karena masih ada yang belum mengerti mengenai aturan. Karakteristik organisasi pelaksana belum berjalan maksimal dimana masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas serta dalam meningkatkan transparansi mengenai-Parking yang belum merata. Prosedur-prosedur parkir di tepi jalan belum optimal, hal ini terlihat masih terdapat juru parkir yang tidak mematuhi prosedur-prosedur dan pengelolaan parkir belum berjalan maksimal.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Parkir

PENDAHULUAN

Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang cukup tinggi. Tingginya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan bahu jalan penuh dengan kendaraan yang sedang parkir. Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Hal tersebut tentu menjadikan alasan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan sangat penting untuk membuat kebijakan pengelolaan parkir di Kota Medan.

Kebijakan pengelolaan parkir di Kota Medan telah diatur dalam pasal 122 hingga pasal 131 di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan Daerah (PERDA) tersebut dijadikan sebagai landasan hukum bagi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan pengelolaan parkir di Kota Medan. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Medan tahun 2020 jumlah kendaraan diwilayah sebanyak 576.756 unit kendaraan. Pemerintah Daerah sendiri sudah mengakomodir pengaturan parkir dalam PERWAL Kota Medan No. 500 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perparkiran dan PERDA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir. Namun, belum mencapai tujuan yang diharapkan dari peraturan tersebut, karena masih ada banyak masalah parkir di kota Medan, seperti penggunaan jalan sebagai tempat parkir, penyelenggara parkir yang tidak menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah tempat parkir, dan parkir ilegal di banyak tempat di kota Medan (Hamonangan, 2023). Untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir UPTD Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas ini, seperti banyaknya juru parkir liar, kekurangan pegawai UPTD, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Pengelolaan parkir di Kota Medan yang menggunakan tepi jalan sering menyebabkan terjadi kemacetan lalu lintas. Adapun jalan yang menjadi penelitian saya yaitu Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh dan di Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Kota Medan tepatnya di Pajak USU. Parkir yang berada di Jalan Jawa Kecamatan Medan Timur di pelataran Rumah Sakit Murni Teguh dimana parkir tersebut berada di tepi jalan dan sejumlah sepeda motor terlihat berbaris di pinggir Jalan Jawa yang membuat ruas jalan menjadi sempit sehingga sering terjadi kemacetan dan juru parkir juga meletakkan sepeda motor diatas trotoar sehingga merampas hak-hak pejalan kaki. Padahal sudah jelas bahwa trotoar digunakan bagi pejalan kaki untuk memudahkan ketika sedang berjalan kaki dan agar pejalan kaki tidak bercampur dengan kendaraan yang mengakibatkan memperlambat arus lalu lintas, tetapi masi ada juru parkir yang meletakkan kendaraan di atas trotoar. Dalam hal ini, pemerintah Kota Medan sudah menerapkan aplikasi e-Parking untuk mengatasi kemacetan yang sudah terselenggara di beberapa wilayah yang ditetapkan. Permasalah yang terjadi merupakan hal yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Medan bebas macet. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan, sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu alternative dalam mengatasi kemacetan di daerah Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiono (2014) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara akurat. dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Sugiono (2017) penelitian yang menghasilkan data yang mengenai data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada sehingga mendapat suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung lapangan dan melakukan wawancara dengan narasumber, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang bagaimana kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Medan.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir...

Sahriani A (2024)

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang lebih didasarkan pada tingkat aktualitas data yang dikumpulkan dari situasi lapangan (Zahara & Nengyanti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kasus penelitian ini akan membahas implementasi kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan. Oleh karena itu, hasil dan pembahasan penelitian ini akan ditunjukkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan. Dari rumusan masalah tersebut terdapat 4 variabel menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang akan dibahas pada hasil penelitian ini yaitu : 1.) Sumber Daya , 2).Komunikasi Antar Organisasi Terkait, 3).Karakteristik Organisasi Pelaksana, 4). Sikap Para Pelaksana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini dilakukan dengan kondisi ataupun peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Tentunya temuan ini menyatakan hasil yang sesuai dengan praktik dilapangan dengan menjejaskan pendalaman isi kajian berupa wawancara langsung dan data yang ada, sehingga lebih jelas sesuai pada implementasinya.

1. Sumber Daya

Sumber daya menurut Meter dan Horn dalam Syahrudin (2019) menyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sarafino dukungan sosial yang tinggi dapat berdampak baik bagi setiap individu yang menjadikannya memiliki pola hidup baik dan sehat (Dhohir et al., 2024).

Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan uji potensi lokasi parkir terlebih dahulu sebelum menentukan sumber daya manusia yang akan ditugaskan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan jumlah dan kriteria juru parkir dengan kebutuhan dan karakteristik lokasi parkir tersebut. Dukungan anggaran pun sangat penting untuk berjalannya kebijakan ini karena setiap kegiatan pasti membutuhkan anggaran dan dukungan fasilitas untuk berjalannya kebijakan penyelenggaraan perparkiran. Sumber daya finansial digunakan Dinas Perhubungan Kota Medan

untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji juru parkir, infrastruktur parkir, pembuatan rambu parkir, dan marka jalan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir membutuhkan alokasi dana yang memadai. Namun belum semua lokasi parker di tepi jalan umum memiliki rambu parkir dan marka jalan, dalam peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimana di dalam peraturan tersebut pada pasal 123 sudah dijelaskan mengenai penyelenggaraan parkir di badan jalan harus memperhatikan rambu parkir dan marka jalan. Dalam kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum juga masi memiliki kendala yaitu seperti keberadaan juru parkir liar dan kurangnya ketaatan juru parkir pada aturan yang telah di tetapkan seperti masih memarkirkan kendaraan di atas trotoar padahal sudah diberitahukan bahwa trotoar bukan tempat untuk parkir, trotoar digunakan untuk pejalan kaki namun masih ada petugas juru parkir yang melanggar peraturan tersebut. Upaya untuk mengatasi kendala ini Dinas Perhubungan Kota Medan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum dan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap aturan. Hasibuan mengatakan Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu (Bahari dan Jaenab 2017).

2. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Menurut Meter dan Horn dalam Syahrudin (2019) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyimpanan informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Asumsi dasar dalam paradigma kritis berkaitan dengan keyakinan bahwa ada kekuatan laten dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi masyarakat (Wulandari, 2019). Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir...

Sahriani A (2024)

kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dan lain-lain.

Dinas Perhubungan Kota Medan telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada juru parkir mengenai peraturan parkir di tepi jalan umum dan prosedur-prosedur parkir, seperti izin dari Dinas Perhubungan Kota Medan dan penggunaan Bad nama serta karcis. Untuk masyarakat umum, sosialisasi dilakukan melalui spanduk dan media sosial dengan memposting informasi tentang ketaatan parkir dan tarif parkir. Sosialisasi kebijakan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum bertujuan agar masyarakat tertib dalam melaksanakan peraturan rambu lalu lintas, mengetahui tarif parkir yang sudah ditetapkan dan bermanfaat agar penataan kota tertib, nyaman, dan rapih. Selain itu, informasi juga sudah disampaikan secara konsisten melalui 6 jajaran patroli parkir yang mengunjungi juru parkir setiap hari untuk memastikan penerapan aturan di lapangan. Dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terkait kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum di Kota Medan dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun belum semua juru parkir dan masyarakat memahami apa yang disampaikan sehingga masi terjadi miskomunikasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Terkait keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat pihak implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus tranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Kasmad, 2018).

Dalam pemilihan Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki kriteria khusus, namun pemahaman terhadap aturan yang telah ditetapkan menjadi faktor utama dalam seleksi. Organisasi berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keberagaman

dengan mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menerapkan izin parkir dan memastikan kelengkapan juru parkir untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka resmi dari Dinas Perhubungan, namun dilapangan masih ada juru parkir yang tidak menggunakan atribut yang lengkap seperti bad name yang sudah disediakan. Dan upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan E-parkir pada 145 titik, di mana proses pengutipan parkir sudah dilakukan secara digital untuk memastikan transparansi, meskipun masih belum secara optimal. Dikarenakan sosialisasi E-parkir belum secara merata dan masyarakat juga belum semua memiliki pembayaran parkir secara non tunai. Namun Dinas Perhubungan sudah melakukan evaluasi kinerja secara rutin dengan memantau lokasi-lokasi parkir, kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan parkir, dan efektivitas penegakan aturan oleh petugas juru parkir.

4. Sikap Para Pelaksana

Metter dan Horn dalam Agustino (2012) mengatakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan dapat menjadi bagian dari sikap pelaksana ini. Dalam penelitian ini sikap pelaksana di maksud kan bagaimana sikap atau tindakan yang di ambil oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam mengimplementasi kan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Medan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan yang akan di capai melalui pengelolaan parkir itu sendiri. Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan sikap yang harus dimiliki juru parkir dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan parkir yaitu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) parkir menunjukkan pentingnya untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan parkir. Hal ini mencakup prosedur-prosedur yang berkaitan dengan penempatan kendaraan, tarif parkir, dan tata tertib parkir lainnya. Namun, dapat dilihat dari 2 lokasi parkir

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir...

Sahriani A (2024)

yang menjadi penelitian ini yaitu Jalan Jawa dan Pajak USU, juru parkir masi belum mematuhi prosedur-prosedur parkir yang telah ditetapkan, seperti masi menempatkan kendaraan di atas trotoar dan membuat parkir secara berlapis yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan di jalan tersebut. Dalam menangani masalah atau konflik yang muncul dalam kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum juru parkir sudah berkomunikasi dengan jelas dan sopan kepada pengendara serta mencari solusi masalah yang terjadi dan Dinas Perhubungan Kota Medan juga langsung turun ke lapangan jika terdapat ada masalah di lokasi parkir untuk memastikan apa yang terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum di Kota Medan telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal dan terlaksana secara sempurna. Hal ini dibuktikan dengan sumber dayanya belum mendukung penuh pelaksanaan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum, hal ini terlihat masi adanya juru parkir yang tidak menaatin aturan-aturan yang ada serta belum memadainya sumber daya finansial dikarenakan belum semua lokasi parkir memiliki rambu parkir dan marka jalan. Sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan pelataran parkir di tepi jalan umum sudah dilakukan namun belum semua juru parkir dan masyarakat mengerti mengenai aturan-aturan parkir di tepi jalan umum. Dan karakteristik organisasi pelaksana belum berjalan maksimal, terlihat masih adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat bertugas, dalam meningkatkan transparansi mengenai E parkir sosialisasi juga belum secara merata dan masyarakat juga belum semua memiliki pembayaran parkir secara non tunai. Sikap pelaksana dalam melakukan prosedur-prosedur parkir di tepi jalan umum masi belum optimal terlihat dari juru parkir masi menempatkan kendaraan di atas trotoar dan membuat parkir secara berlapis yang mengakibatkan sering terjadinya kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Dhohir, M., Sawitri, D., & Malang, U. G. (2024). *KEPUASAN KERJA SEBAGAI INTERVENING UNTUK INTERAKSI SOSIAL DAN SOCIAL SUPPORT TERHADAP* Mohammad Dhohir, Cs : *Kepuasan Kerja Sebagai Intervening 11*, 69–83.

- Fadlan Ma'alif; Bahari, J. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 3264–3268. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803>
- Hamonangan, M. D. I. (2023). Problematika Retribusi Parkir Di Kota Medan Berdasarkan (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran) Mhd. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 2649–2654.
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. alfabeta.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cv alvabeta.
- Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.
- Wulandari, R. A. (2019). Gambaran nilai budaya dan kearifan lokal dalam film Wood Job! *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 7(2), 79. <https://doi.org/10.30659/jikm.7.2.79-96>
- Zahara, & Nengyanti. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 dalam Rangka Alih Fungsi Lahan Rawa sebagai Pengurangan Risiko Banjir di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya ...*, 2012, 1–7. <http://www.ejournal-pps.unsri.ac.id/index.php/dejos/article/view/51>